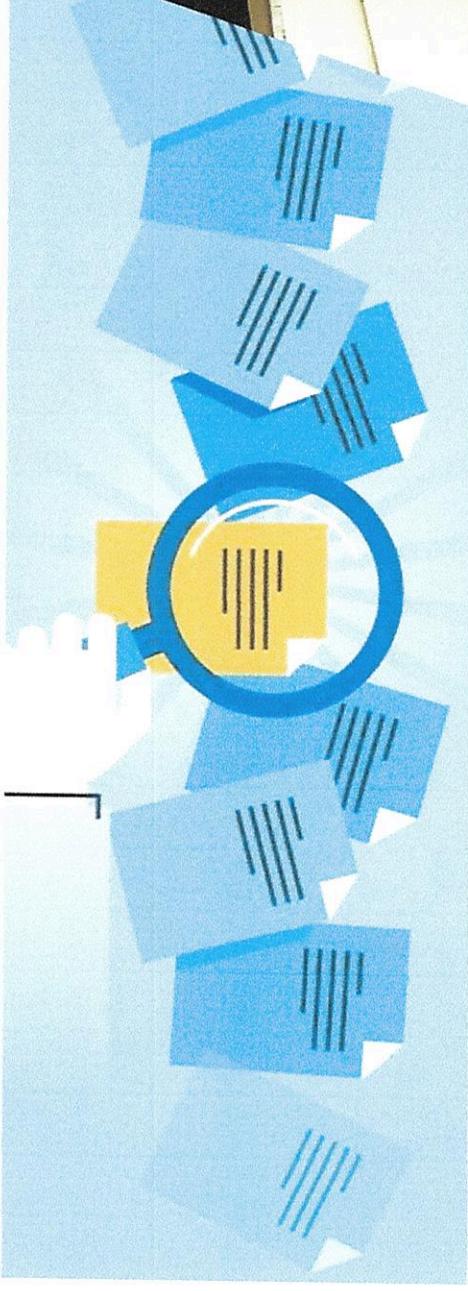


REVIU 2020 INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

JL. Padangsidimpuan Nomor 6 Sarudik



www.pn-sibolga.go.id



pnsibolga@gmail.com



PengadilanNegeriSibolga



PengadilanNegeriSibolga

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undangundang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kejakiman;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kejakiman;

Undang undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekepatirataan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931/SEK/OT.01.2/1/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Tentang
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGRI SIBOLGA KELAS II
KETUA PENGADILAN NEGRI SIBOLGA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGRI SIBOLGA
NOMOR : W2.U9/624/OT.01.1/2/2021

Website : www.pn-sibolga.go.id Email : pnsibolga@gmail.com
Jln. Padangsidiimpuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

PENGADILAN NEGRI SIBOLGA KELAS II

Mempertahikan : Hasil Rapat Tim Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sibolga tanggap
22 Desember 2020 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penyadilan Negeri Sibolga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGGADILAN NEGRI SIBOLGA TENTANG PENETAPAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGGADILAN NEGRI SIBOLGA

PERATAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Pengadilan Negeri Sibolga, untuk menetapkan Rensstra, Rencaha

Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIPI) serta melakukannya evaluasi pencapaian

dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian

untuk lebih menyelarasakan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan

Pengadilan Negeri Sibolga agar tetap memiliki IKU yang valid dan

pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dipertahiki sebagaimana mestinya.

KEDUA : Bahwa dalam melakukannya Review Indikator Kinerja Utama berujung kinerja.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGGADILAN NEGRI SIBOLGA

PERATAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Pengadilan Negeri Sibolga, untuk menetapkan Rensstra, Rencaha

Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIPI) serta melakukannya evaluasi pencapaian

dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian

untuk lebih menyelarasakan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan

Pengadilan Negeri Sibolga agar tetap memiliki IKU yang valid dan

pelaksanaan program dan kegiatan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 10 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
NIP. 19761121 200112 2 001
GABE DORIS MORA BORU SARAGIH, SH,MH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENGUNJUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	TERWUJUDNYA APROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	<ul style="list-style-type: none"> - A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata 	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
	B. Persentase perkara:	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Perdata <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Catatan:</p> <p>•Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</p> <p>•Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa tahun sebelumnya.</p> <p>•Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera
	C. Persentase Penurunan sisa perkara:	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Perdata 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: •Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUH JAWAB	SUMBER DATA
	D.	D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%		Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		- upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	Jumlah perkara yang ada	Panitera	
	E.	E. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan Diversi	<p><u>Jumlah perkara Pidana Anak Yang diselesaikan diversi</u> x 100%</p> <p>Catatan: •Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>		Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
	F.	F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><u>Index Kepuasaan Masyarakat (IKM)</u></p> <p><u>Index Persepsi Korupsi (IPK)</u></p>		
		Catatan: •Permenpan –RB Nomor 14 Tahun 2017			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNGAN JAWAB	SUMBER DATA
2	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	A. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<p>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</p> <p>$\times 100\%$</p>	Panitara	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		B. Persentase perkara yang melalui Mediasi	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>$\times 100\%$</p>	Panitara	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		C. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara lengkap</p> <p>$\times 100\%$</p>	Panitara	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
	D. Persentase Putusan perkara yang memuat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	<p>Jumlah putusan perkara yang diupload diwebsite</p> <p>$\times 100\%$</p>	Jumlah perkara yang putusan	Panitara	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

4

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENGUNGGUNGAN JAWAB	SUMBER DATA
3	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRAN	A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan B. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan C. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM)	<i>Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan</i> x 100% Catatan: •PERMA NO 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. •Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) <i>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</i> x 100%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
			<i>Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum</i> x 100%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
			<i>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</i>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

5

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUH JAWAB	SUMBER DATA
4	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Percentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti yang di tindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti x100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	<p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p>

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA



GABE DORISMORA BORU SARAGIH, SH.MH.